

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan dari setiap tahap pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat dimana meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya. Visi pembangunan pertanian yaitu pertanian modern, tangguh dan efisien dengan berkecukupan pangan. Misinya adalah keterpaduan pembinaan dan pelayanan, partisipasi aktif petani, optimalisasi sumberdaya domestik, pengelolaan pangan/agro industri, sistem distribusi dan pemasaran, dan penganekaragaman konsumsi.

Pembangunan pertanian di Indonesia diawali dengan suatu program yang dinamakan Rencana Kasimo pada tahun 1945 yang kemudian dikembangkan menjadi Rencana Kesejahteraan Istimewa (1949). Sistem penyuluhan pertanian di Indonesia terus berkembang yang kemudian lahir program BIMAS (Bimbingan Massal) pada tahun 1964. Tugas utama Bimas adalah mengupayakan agar Indonesia mampu berswasembada beras. Pada periode 1967-1973, Bimas disempurnakan, bimbingan kepada petani diperluas bukan hanya petani yang menggunakan kredit usahatani, namun juga bimbingan dilaksanakan kepada petani mapan yang tidak memerlukan fasilitas kredit, pembinaannya menggunakan istilah Intensifikasi Massal (INMAS). Pada periode 1973-1987, diintroduksikan pembinaan dengan menggunakan pola Intensifikasi Umum (INMUM) dan Intensifikasi Khusus (INSUS). Tahun

1984, program Bimas telah menghantarkan Indonesia mampu berswasembada beras dan pada tahun-tahun berikutnya Indonesia mampu mengekspor beras ke beberapa negara (Effendi, 2005).

Untuk menyesuaikan dengan akselerasi dinamika pembangunan pertanian akibat pertumbuhan penduduk yang pesat, maka pada tahun 1987/1988 diperkenalkan SUPRA INSUS yang mengandung makna pembinaan (rekayasa teknologi, sosial dan ekonomi), dan pola Kredit Usaha Tani (KUT), sebagai pengganti pola Kredit Bimas. Untuk menyongsong era globalisasi dan perdagangan bebas pada milenium ke III, program Bimas berkembang menjadi dua program pokok yaitu program Bimas Nasional dan program Bimas Wilayah (spesifikasi). Pada periode 1998-2002, orientasi pembinaan Bimas diarahkan pada pengembangan agribisnis sehingga dilahirkan rekayasa Intensifikasi Berwawasan Agribisnis (INBIS). Bimas terus disempurnakan menjadi Program Bimas Intensifikasi Pertanian. Pada tahun 2005 hingga sekarang, pemerintah mencanangkan program Revitalisasi Penyuluhan Pertanian untuk mewujudkan pertanian tangguh untuk pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani (Effendi, 2005).

Salah satu komoditi pertanian yang cukup berhasil dikembangkan di provinsi Lampung adalah Jagung. Jagung tidak hanya digunakan untuk bahan pangan tetapi juga untuk pakan. Dalam beberapa tahun terakhir proporsi penggunaan jagung oleh industri pakan telah mencapai 50% dari total kebutuhan nasional, apabila harus diimpor karena produksi dalam negeri tidak cukup akan menelan

devisa yang tidak sedikit. Dalam 20 tahun ke depan, penggunaan jagung untuk bahan pakan diperkirakan terus meningkat, bahkan setelah tahun 2020, lebih dari 60% dari total kebutuhan nasional. Ditinjau dari sumber daya lahan dan ketersediaan teknologi, Indonesia memiliki peluang untuk berswasembada jagung, bahkan menjadi pemasok di pasar dunia. Ada beberapa wilayah sentra produksi jagung di Indonesia, salah satunya Provinsi Lampung. Dilihat dari produksi jagung yang dihasilkan, saat ini Provinsi Lampung berada di urutan ketiga setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah, seperti disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan luas panen, produksi, dan produktivitas jagung pada beberapa sentra produksi jagung di Indonesia, tahun 2003-2007

No	Provinsi	2003	2004	2005	2006	2007	Growth (%/th)
1	Jawa Timur	4.181.5	4.133.7	4.398.5	4.011.1	4.393.6	1,5
	Produksi (ton)	50	62	02	82	56	-0,23
	Luas panen (ha)	1.169.3	1.141.6	1.167.6	1.099.1	1.154.3	1,58
	Produktivitas (ton/ha)	3,58	3,62	3,65	3,65	3,81	-3,66
	Pangsa produksi (%)	38,41	36,86	35,12	34,55	33,08	
2	Jawa Tengah	1.836.2	2.121.2	2.191.2	1.856.0	2.206.6	5,6
	Produksi (ton)	33	97	58	23	39	-0,33
	Luas panen (ha)	599.97	521.64	578.40	497.92	571.48	2,93
	Produktivitas (ton/ha)	3	5	4	8	4	-0,02
	Pangsa produksi (%)	3,44	3,52	3,67	3,73	3,86	
		16,87	18,90	17,50	15,99	16,62	
3	Lampung	1.087.751	1.216.9	1.439.0	1.183.9	1.339.0	6,38
	Produksi (ton)	330.852	74	00	82	74	3,62
	Luas panen (ha)	3,29	74	00	82	74	2,57
	Produktivitas (ton/ha)	10,00	364.84	411.62	332.64	368.32	0,5
	Pangsa produksi (%)		2	9	0	5	
			3,34	3,50	3,56	3,64	
4	Sumatera Utara	687.360	712.56	735.45	682.02	788.09	3,79
	Produksi (ton)	210.782	0	6	4	1	2,19
	Luas panen (ha)	3,26	214.88	218.37	200.14	227.27	1,57
	Produktivitas (ton/ha)	6,31	5	5	6	7	-1,48
	Pangsa produksi (%)		3,31	3,36	3,41	3,47	
			6,35	5,87	5,87	5,93	
5	Sulawesi Selatan	650.832	674.71	705.99	696.08	896.83	8,94
	Produksi (ton)	213.818	6	5	4	9	5,05
	Luas panen (ha)	3,04	6	5	4	9	3,89
	Produktivitas (ton/ha)	5,99	196.39	201.03	206.38	254.52	3,27
	Pangsa produksi (%)		3	7	7	6	
			3,44	3,42	3,37	3,52	
		6,01	5,64	6,00	6,75		

Indonesia	10.886.442	11.225.243	12.523.894	11.609.463	13.279.794	5,44
Produksi (ton)	3.357.803	3.356.914	3.506.234	3.345.805	3.619.411	2,01
Luas panen (ha)	3,24	3,34	3,43	3,47	3,67	3,18
Produktivitas (ton/ha)						

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa Provinsi Lampung pada tahun 2007 mampu menghasilkan produksi 1.339.074 ton atau 10,08 persen dari total produksi nasional. Produksi jagung yang dihasilkan Provinsi Lampung pada periode tahun 2003-2007 tidak kurang dari 10 persen produksi jagung nasional, dengan tingkat pertumbuhan produksi 6,38 persen per tahun. Pertumbuhan produktivitas jagung di Provinsi Lampung sebesar 2,57 persen per tahun masih dibawah rata-rata nasional sebesar 5,44 persen per tahun, sehingga masih memiliki potensi untuk ditingkatkan.

Pemerintah berupaya untuk mengembangkan agribisnis jagung di Provinsi Lampung khususnya Lampung Selatan karena merupakan daerah yang potensial dalam memproduksi jagung. Adapun luas areal panen di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas panen dan produksi tanaman jagung di Provinsi Lampung, tahun 2008

Kabupaten/Kota (Ha)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
1. Lampung Barat	943	2.950
2. Tanggamus	9.637	32.890
3. Lampung Selatan	87.182	374.468
4. Lampung Timur	99.566	349.652
5. Lampung Tengah	79.522	285.450
6. Lampung Utara	29.468	98.104
7. Way Kanan	10.582	35.022
8. Tulang Bawang	9.980	32.945
9. Bandar Lampung	226	845
10. Metro	465	1.613
Jumlah	332.640	1.183.982

Propinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan mempunyai produksi tanaman jagung yang tinggi di Propinsi Lampung setelah Lampung Timur. Kabupaten Lampung Selatan menghasilkan produksi tanaman jagung sebesar 374.468 ton. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Selatan masih memiliki produksi tanaman jagung yang tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Luas panen, produksi dan produktivitas tanaman jagung per kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat Tabel 3.

Tabel 3. Luas panen, produksi dan produktivitas tanaman jagung per kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008

Kecamatan	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton)
1. Natar	10.175	42.654,3	4,19
2. Jati Agung	8.550	35.779,0	4,18
3. Tanjung Bintang	6.059	26.873,8	4,43
4. Tanjung Sari	-	-	-
5. Katibung	7.835	35.117,8	4,48
6. Merbau Mataram	5.857	26.027,8	4,44

7. Way Sulan	-	-	-
8. Sidomulyo	7.354	32.850,9	4,46
9. Candipuro	2.552	11.111,5	4,35
10. Way Panji	-	-	-
11. Kalianda	4.085	17.621,6	4,31
12. Rajabasa	85	376,3	4,42
13. Palas	7.366	31.167,1	4,23
14. Sragi	3.217	13.352,0	4,15
15. Penengahan	9.847	40.787,0	4,14
16. Ketapang	14.200	60.748,8	4,27
17. Bakauheni	-	-	-
Jumlah	87.182	374.468	56,05

penyebab rendahnya produksi adalah masih sedikitnya petani yang belum menggunakan benih unggul dan pupuk sesuai dosis anjuran. Dilihat dari permasalahan tersebut tentu saja akan mempengaruhi pendapatan petani jagung itu sendiri. Oleh karena itu penyuluh harus meningkatkan kinerjanya agar petani jagung dapat menyelesaikan permasalahannya dalam berusahatani sehingga produksi tanaman jagung meningkat dan pendapatannya juga meningkat.

Syarat pokok dan faktor pelancar pembangunan pertanian adalah adanya kegiatan penyuluhan/pendidikan pembangunan pertanian. Penyuluhan pertanian sebagai bagian dari subsistem pembangunan pertanian, harus dilaksanakan sebaik-baiknya yang mengarah pada peningkatan kinerja dan peningkatan profesionalisme sejalan dengan perkembangan subsistem yang lain. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) seringkali dianggap menjadi ujung tombak penyuluhan pertanian memegang peranan penting dalam pelaksanaan program penyuluhan di lapangan, sebab mereka adalah pelaksana teknis yang langsung berhadapan dengan sasaran/petani (Soedijanto, 1996).

Keberhasilan pembangunan pertanian ditentukan oleh peran serta petani dan keluarganya dalam melakukan aktivitas usahatannya, yang juga dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki oleh petani. Peran serta petani tersebut dapat ditingkatkan melalui kegiatan penyuluhan pertanian sehingga kegiatan usahatannya dapat diarahkan selain untuk kegiatan meningkatkan produksi juga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Hal inilah yang mendorong pemerintah membentuk BIPP (Balai Informasi Penyuluhan Pertanian) di tingkat provinsi dan BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) di tingkat kabupaten yang kemudian mengalami perubahan semenjak berlakunya UU No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah menjadi KIPP (Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian) yang berfungsi sebagai pusat koordinasi BPP (BPP Natar, 2009).

BPP merupakan instalasi KIPP yang menunjang penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan. BPP ini adalah sentra penyuluhan pertanian di kecamatan dan pedesaan untuk petani-nelayan. Para penyuluh wajib bekerja sebagai satu kesatuan tim penyuluh yang melayani keperluan pendidikan non-formal petani-nelayan dalam pengembangan usahanya untuk mengembangkan kecamatan sebagai satu kesatuan wilayah ekonomi yang perlu dibangun berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat. Data penyuluh pertanian PNS dan Tenaga Harian Lepas / Tenaga Bantuan (THL-TB) Penyuluh Pertanian di Propinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Data penyuluh pertanian PNS dan Tenaga Harian Lepas/ Tenaga Bantuan (THL-TB) PP Propinsi Lampung Tahun 2008

No.	Kabupaten/ Kota	PP PNS	THL-TB PP	Total PP
1.	Bandar	17	34	51

	Lampung			
2.	Metro	24	11	35
3.	Lampung Barat	50	43	93
4.	Lampung Selatan	135	38	173
5.	Lampung Tengah	107	57	164
6.	Lampung Timur	102	39	141
7.	Lampung Utara	122	49	171
8.	Tanggamus	91	62	153
9.	Tulang Bawang	127	41	168
10.	Way Kanan	59	39	98
11.	Pesawaran	48	16	64
Total	882	429	1311	

Tabel 4 menunjukkan jumlah penyuluh di setiap kota/kabupaten di Propinsi Lampung. Jumlah penyuluh terbesar berada di Kabupaten Lampung Selatan yaitu 173 orang. Data penyuluh pertanian per kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada Tabel 5. Tabel 5. Data penyuluh pertanian per kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008

No.	Kecamatan	Jumlah Penyuluh	Jumlah Desa
1.	Penengahan	11	22
2.	Bakauheni	5	5
3.	Ketapang	12	16
4.	Palas	14	21
5.	Sragi	10	10
6.	Kalianda	12	26
7.	Rajabasa	7	15
8.	Sidomulyo	10	15
9.	Way Panji	5	4
10.	Candipuro	11	14
11.	Katibung	5	11
12.	Way Sulan	5	8
13.	Merbau	8	16
	Mataram		
14.	Tanjung Bintang	8	7
15.	Tanjung Sari	5	8
16.	Jati Agung	13	19
17.	Natar	16	22
18.	Kabupaten	15	-

Penyuluh pertanian yang secara fungsional dalam tugas sehari-hari melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian mestilah menyadari bahwa peningkatan pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani pada wilayah binaannya masing-masing merupakan upaya “pembinaan” untuk dapat lebih baik lagi mengelola usahataniya dalam era agribisnis. Hal tersebut

dimaksudkan agar terjadi peningkatan produksi dan produktivitas usahatani untuk meningkatkan pendapatan sehingga tujuan pembangunan pertanian yaitu meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya dapat tercapai (Ningsih, 2006).

Keberhasilan kegiatan penyuluhan saat ini tidak terlepas dari aktivitas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), karena PPL ini secara langsung berhubungan dengan petani (Mardikanto, 1993). Keberhasilan PPL dalam menjalankan tugasnya dapat dilihat dari kinerja yang tercermin dari pelaksanaan tugas pokoknya dengan baik. Kinerja merupakan dimensi dari kualitas, yaitu seberapa seseorang melakukan tugasnya. Seorang penyuluh pertanian diharapkan menjadi penyuluh yang profesional, berarti memiliki pengetahuan atau wawasan dalam bidang pertanian yang dicirikan dengan kinerja tinggi, menguasai iptek, kreatif, inovatif dan berwawasan luas.

Pembangunan pertanian harus dilaksanakan melalui pendekatan multi faktor dengan melibatkan semua komponen yang terlibat didalamnya dan dalam praktiknya. Pembangunan pertanian tetap harus memprioritaskan petani sebagai pelaku kegiatan pertanian. Untuk itu pembangunan pertanian diarahkan untuk lebih memberdayakan petani agar mereka bisa melaksanakan

usahataniya lebih efisien dan produktif sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dimana peneliti memfokuskan penelitiannya pada peningkatan pendapatan petani.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kinerja penyuluh pertanian di Kecamatan Natar?
2. Bagaimana tingkat pendapatan petani jagung di Kecamatan Natar?
3. Apakah faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja penyuluh pertanian di Kecamatan Natar?
4. Apakah ada hubungan antara kinerja penyuluh dengan tingkat produksi jagung di Kecamatan Natar?
5. Apakah ada hubungan antara tingkat produksi jagung dengan tingkat pendapatan usahatani petani jagung di Kecamatan Natar?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Tingkat kinerja penyuluh pertanian di Kecamatan Natar.
2. Tingkat pendapatan usahatani petani jagung di Kecamatan Natar.
3. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja penyuluh pertanian di Kecamatan Natar
4. Hubungan antara kinerja penyuluh dengan tingkat produksi jagung di Kecamatan Natar.
5. Hubungan antara tingkat produksi jagung dengan tingkat pendapatan usahatani petani jagung di Kecamatan Natar.

C. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diantaranya untuk:

1. Bahan masukan dan pertimbangan bagi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dalam penyelenggaraan program penyuluhan pertanian untuk komoditi jagung.
2. Bahan masukan dan pertimbangan bagi PPL terutama di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
3. Pengembangan ilmu pengetahuan dan referensi bagi penelitian sejenis.